

# Menuntut Keterbukaan Informasi Mega Proyek Lapangan Merdeka Kota Medan

Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) pemerintah penting dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah dan memperlebar ruang publik berpartisipasi mengawal PBJ. Partisipasi publik diperlukan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi PBJ. Terlebih, korupsi PBJ menempatkan warga sebagai korban secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian yang dialami warga tidak hanya perihal buruknya kualitas pekerjaan yang dihasilkan, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektivitas keuangan negara yang berasal dari penarikan pajak warga.

Meski telah memasuki era keterbukaan informasi dan digitalisasi pengadaan, korupsi PBJ masih saja tinggi. Sepanjang 2019 hingga 2023, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 1.162 kasus korupsi PBJ yang ditindak penegak hukum dengan potensi kerugian negara Rp 45,2 triliun. Jumlah kasus tersebut diakumulasi dari kasus yang terjadi di tingkat nasional hingga daerah. Jumlah ini tentu bukan jumlah yang sedikit dan berpotensi terus meningkat.

Untuk meningkatkan peran publik mengawal pengadaan, keterbukaan informasi pengadaan fundamental dibutuhkan. Keterbukaan PBJ secara hukum telah dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pasal 14 ayat 2 PerKI mengklasifikasikan informasi PBJ sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik dan secara otomatis menjadi informasi yang harus tersedia setiap saat.

Namun, masih ada *gap* antara regulasi dan implementasi. Dalam kajian ICW atas implementasi keterbukaan informasi PBJ pasca lahirnya PerKI SLIP, ICW menyimpulkan bahwa PerKI SLIP belum efektif berjalan dan publik harus menempuh mekanisme panjang untuk mendapatkan informasi. Bahkan, memenangkan sengketa di Komisi Informasi tidak cukup menjamin publik mendapatkan informasi PBJ. Seperti pengalaman mengakses dan sengketa informasi terkait pengadaan “Revitalisasi Lapangan Merdeka” di Medan Sumatera Utara.

## Sekilas Lapangan Merdeka Kota Medan

Lapangan Merdeka adalah alun-alun yang merupakan *landmark* bersejarah Kota Medan. Lapangan seluas 4,88 hektare ini lekat dengan sejarah Kota Medan sejak era kolonial. Di kawasan Lapangan Merdeka juga terdapat Monumen Pancasila, tugu peringatan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia wilayah Sumatera pada 6 Oktober 1945.

Dalam perkembangannya, Lapangan Merdeka didominasi kawasan komersial, seperti lahan parkir kereta api hingga Merdeka Walk. Ini membuat Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara (KMS M-SU) mengajukan gugatan<sup>1</sup> untuk menuntut Pemerintah Kota Medan menetapkan kawasan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan pada 2020. PN

---

<sup>1</sup> Nomor perkara 756/Pdt.G/2020/PN Mdn dengan penggugat yaitu Prof Usman Pelly, Meuthia F Fachruddin, Miduk Hutabarat, Rizanul, Burhan Batubara, dan Dadang Darmawan

mengabulkan sebagian tuntutan dan memerintahkan Pemerintah Kota Medan segera menetapkan status Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya.

Keberatan dengan putusan PN, Wali Kota Medan Bobby Nasution yang baru terpilih dan dilantik pada 26 Februari 2021 mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada 27 Juli 2021. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan putusan PN Medan. Puncaknya, Mahkamah Agung tetap menetapkan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya pada 28 Oktober 2021.

Pemerintah Kota Medan kemudian menggencarkan rencana revitalisasi Lapangan Merdeka, salah satunya dengan dalih mengembalikan fungsi cagar budaya. Revitalisasi Lapangan Merdeka sudah dimulai sejak pertengahan 2021. Namun sejak ditetapkan sebagai cagar budaya, revitalisasi Lapangan Merdeka menjelma menjadi mega proyek senilai ratusan miliar rupiah. Pada September 2021, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bahkan menyatakan komitmennya untuk membantu Pemerintah Kota Medan merevitalisasi Lapangan Merdeka dengan menggelontorkan anggaran Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 100 Miliar. Bantuan ini direalisasikan pada tahun anggaran 2022.

Babak baru revitalisasi Lapangan Merdeka untuk “cagar budaya” ditandai dengan peletakan batu pertama proyek yang digelar pada 7 Juli 2022<sup>2</sup> dan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pun “disesuaikan” dengan rencana mega proyek Lapangan Merdeka. RTRW Kota Medan yang seyogyanya berakhir pada 2031 kemudian dikaji ulang dan lahirlah RTRW Kota Medan tahun 2022-2042. Di dalam RTRW ini, posisi lapangan Merdeka semakin strategis sebagai *Transit Oriented Development* (TOD) Kota, selain daerah Belawan.

## Mega Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka

Ditelisik dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan, sejak 2021 hingga 2024 pengadaan terkait Lapangan Merdeka Kota Medan mendapat alokasi anggaran pengadaan Rp612.763.647.796,-. Dua proyek dengan nilai anggaran terbesar yaitu Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka tahun 2022 dan Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka Multiyears 2023-2024.

Dari mana sumber anggarannya? Pekerjaan Tahap I Revitalisasi Lapangan Merdeka berbekal bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Rincian proyeknya meliputi pembangunan fisik Lapangan Merdeka dengan pagu anggaran Rp 97 Miliar, manajemen konstruksi Rp 2,5 miliar. Pekerjaan tahap II dan selanjutnya menggunakan APBD Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda Sumatera Utara membenarkan adanya bantuan Rp 100 Miliar dari APBD Sumatera Utara untuk revitalisasi Lapangan Merdeka. Bantuan keuangan tersebut menyita 25% anggaran BKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 33 kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya pembangunan revitalisasi Lapangan Merdeka. Meski merupakan bantuan keuangan provinsi adalah

---

<sup>2</sup> Presiden Letakkan Batu Pertama Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan  
(Link:<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/07/presiden-letakkan-batu-pertama-revitalisasi-lapangan-merdeka-medan>), diakses pada 15 Juli 2024 (12.12 Wib)

legal dan merupakan hak prerogatif gubernur sebagai pimpinan daerah, bantuan keuangan ini idealnya merujuk pada kebutuhan mendasar kabupaten/ kota.

Sepanjang tahun anggaran 2021-2024 terdapat 11 proyek pengadaan dengan kata kunci Lapangan Merdeka di LPSE Kota Medan, yaitu:

No.	Nama Proyek	Tanggal Pembuatan	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Penyedia
1	<u>Rehabilitasi Skybridge di Lapangan Merdeka</u>	6 Juli 2021	2021	3.000.000.000,00	2.722.089.679,65 <sup>3</sup>	CV Cakra Buana Sakti
2	<u>Rehabilitasi Pendopo Lapangan Merdeka Kota Medan</u>	5 Juli 2021	2021	800.000.000,00	655.950.866,88	CV Hafik Jaya
3	<u>Penyediaan marka bus stop cold plastic koridor Pinang Baris lapangan merdeka</u>	18 September 2021	2021	300.000.000,00	282.489.559,00	CV Audrey Agung Anugerah
4	<u>Penyediaan marka bus stop cold plastic koridor amplas lapangan merdeka</u>	28 September 2021	2021	298.658.700,00	282.489.559,00	CV Audrey Agung Anugerah
5	<u>Penyediaan marka bus stop cold plastic koridor Tuntungan lapangan merdeka</u>	28 September 2021	2021	300.000.000,00	297.579.084,00	CV Berkat Jaya
6	<u>Penyediaan marka bus stop cold plastic koridor Belawan lapangan merdeka</u>	28 September 2021	2021	300.000.000,00	297.579.084,00	CV Berkat Jaya

<sup>3</sup> Harga penawaran (nilai kontrak tidak tercantum di LPSE Kota Medan)

7	<u>Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan</u>	9 Mei 2022	2022	2.500.000.000,00	1.070.412.960,00	PT Harawana Consultant
8	<u>Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan</u>	2 Juni 2022	2022	97.500.000.000,00	91.555.327.000,00	PT Lince Romauli Raya
9	<u>Jasa konsultasi Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lapangan Merdeka Dhi Penyusunan Studi Kelayakan Lapangan Merdeka Kota Medan</u>	4 Juni 2022	2022	5.300.000.000,00	277.722.000,00	PT Artek Utam
10	<u>Jasa konsultasi manajemen konstruksi revitalisasi lapangan merdeka</u>	29 Januari 2023	2023-2024	7.503.916.096,00	528.684.120,00	PT Kanta Karya Utama
11	<u>Revitalisasi kawasan lapangan medan merdeka (Multiyears)</u>	5 Maret 2023	2023-2024	500.261.073.000,00	497.207.615.000,00	PT Cimendang Sakti Kontrakindo

## Gugatan Warga Atas Revitalisasi Lapangan Merdeka Jilid II

Jika dibandingkan anggaran pembangunan lainnya di Kota Medan, Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka menyedot anggaran fantastis. Alokasi anggaran jumbo ini menarik perhatian luas masyarakat. Terlebih Pemerintah Kota Medan acap kali menyebut tujuan pemugaran adalah untuk menjadikan Lapangan Merdeka sebagai situs cagar budaya sebagaimana tuntutan masyarakat, ruang terbuka publik, dan ruang terbuka hijau.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Revitalisasi Kembalikan Fungsi Cagar Budaya Sekaligus Jadikan Lapangan Merdeka Ruang Terbuka Publik dan RTH(Link:[https://portal.pemkomedan.go.id/berita/revitalisasi-kembalikan-fungsi-cagar-budaya-sekaligus-jadikan-lapangan-merdeka-ruang-terbuka-publik-dan-rth\\_read2056.html](https://portal.pemkomedan.go.id/berita/revitalisasi-kembalikan-fungsi-cagar-budaya-sekaligus-jadikan-lapangan-merdeka-ruang-terbuka-publik-dan-rth_read2056.html)), diakses pada 15 Juli 2024 (11.00 Wib)

Dua tahun berlalu, revitalisasi Lapangan Merdeka justru makin jauh dari tujuan cagar budaya. Akibatnya, gugatan warga (*citizen lawsuit*) kembali bergulir.<sup>5</sup> Alih-alih menjadikan cagar budaya, proyek ini dinilai Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Medan justru merusak unsur cagar budaya karena menggali hamparan lapangan hanya untuk area komersial dan tempat parkir bawah tanah. Pemerintah Kota Medan dituntut untuk menghentikan revitalisasi Lapangan Merdeka dan melakukan restorasi, rehabilitasi, pemugaran, dan rekonstruksi Lapangan Merdeka.<sup>6</sup>

Penggugat yang tergabung dalam KMS Medan kemudian kembali mendaftarkan *citizen lawsuit* ke Pengadilan Negeri Medan pada 3 Juli 2023.<sup>7</sup> Menurut KMS Medan, pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan tidak sesuai dengan tujuan mempertahankan nilai sejarah, nilai budaya, dan ruang terbuka hijau. Tergugat dari gugatan ini yaitu Wali Kota Medan (tergugat 1) dan Ketua DPRD Kota Medan (tergugat 2). Gugatan ini didaftarkan setelah pemberitahuan atau notifikasi gugatan yang dilayangkan pada 6 April 2023 tidak direspon oleh pemerintah Kota Medan dan juga DPRD Kota Medan. Gugatan warga ini masih terus bergulir.

## Penelusuran Penyedia Lapangan Merdeka

### 1. PT Lince Romauli Raya: Penyedia Proyek Lapangan Merdeka Rp 91,5 Miliar

Dari penelusuran informasi PBJ dengan metode tender di Opendender.net, PT Lince Romauli Raya (LRR) sepanjang 2014-2024 memenangkan 27 tender.<sup>8</sup> Total pagu anggaran yang perusahaan ini menangkan mencapai Rp 2,23 triliun.

PT LRR mempunyai rekam jejak merah dalam menjadi penyedia PBJ. Perusahaan ini pernah menjadi penyedia pengadaan pengerukan alur pelayaran Sungai Batanghari Pelabuhan Talang Hulu, Jambi. Proyek pengerukan senilai Rp 7,781 miliar tersebut terbukti tidak selesai sesuai kontrak dan menyebabkan kerugian negara Rp 5,3 miliar.

Proyek Kementerian Perhubungan tersebut direncanakan selesai dengan masa kerja 90 hari, yaitu mulai 19 Agustus sampai 16 November 2011. Masa kerja kemudian diperpanjang selama 25 hari, hingga 15 Desember 2011. Namun meski sudah diperpanjang, pekerjaan tersebut belum tuntas.

---

<sup>5</sup> Penggugat adalah Tujuh warga Kota Medan, yaitu Guru Besar Antropologi Universitas Negeri Medan (Unimed) Usman Pelly, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Rosdanelli Hasibuan, pengajar di Fakultas Teknik Unimed Meuthia F Fachruddin, Sekretaris Himpunan Pengembang Jalan Indonesia Sumut Burhan Batubara, karyawan swasta Rizanul, karyawan swasta Dina Lumban Tobing, dan Koordinator KMS M-U Miduk Hutabarat

<sup>6</sup><https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/03/notifikasi-diabaikan-wali-kota-warga-medan-resmi-gugat-revitalisasi-lapangan-merdeka>

<sup>7</sup> Notifikasi Diabaikan Wali Kota, Warga Medan Resmi Gugat Revitalisasi Lapangan Merdeka (Link:<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/03/notifikasi-diabaikan-wali-kota-warga-medan-resmi-gugat-revitalisasi-lapangan-merdeka>), diakses pada 15 Juli 2024 (13.30 Wib)

<sup>8</sup> [https://opentender.net/tender?year=2023&page=1&page\\_size=25&q=Lince+Romauli+Raya](https://opentender.net/tender?year=2023&page=1&page_size=25&q=Lince+Romauli+Raya), diakses pada 22 Juli 2024 (14.10 Wib)

Pengawas internal Pelabuhan Jambi menemukan bahwa hingga 5 Desember 2011, tidak dilakukan pekerjaan pengerukan. Pengerukan baru dilakukan pada 6-20 Desember 2011.<sup>9</sup>

Penanganan perkara korupsi PBJ ini membongkar praktik pinjam meminjam perusahaan PT LRR untuk menjadi penyedia PBJ. Perusahaan ini terbukti “dipinjam” oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar melalui Direktur PT LRR Mardin Zentrato. Sebagai imbalannya, perusahaan ini akan mendapat *fee* 1,5% dari nilai proyek yang kemudian ditetapkan Rp 100 juta. Uang tersebut diserahkan ke Mardin Zentrato dalam dua tahap, yaitu pada Agustus dan Desember 2011. 50% dari *fee* yang didapat tersebut diserahkan Mardin kepada Direktur Utama PT LRR Tonggung Napitupulu.

Perusahaan ini juga bersekongkol dengan penyedia yang menjadi konsultan pengawas, yaitu PT Multi Hexagon Karya. Sebagai pengawas, perusahaan ini melaporkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu 286.760m<sup>3</sup>. Laporan pengawasan ini kemudian digunakan sebagai kelengkapan pengajuan pencairan anggaran proyek kepada PT LRR.

Kasus ini melibatkan 7 tersangka, yaitu:

Nama	Jabatan/ Peran	Vonis
Wahyu Asoka	Pelaksana proyek/ peminjam PT LRR	6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta <sup>10</sup>
Gerry Iskandar		1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta <sup>11</sup>
Sutrisno	Manager Proyek PT LRR	1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta <sup>12</sup>
Tonggung Napitupulu	Dirut PT LRR (penyedia proyek)	-6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta -Uang pengganti Rp 5,3 miliar. <sup>13</sup>
M. Toha Maryono	Konsultan pengawas PT Multi Hexagon Karya	NA
Arief Hidayat		NA

## 2. PT Cimendang Sakti Kontrakindo: Penyedia Proyek Lapangan Merdeka Rp 497,2 M

<sup>9</sup> Terpidana Kasus Pengerukan Alur Sungai Batanghari Ajukan PK (Link:<https://jambi.antaranews.com/berita/331095/terpidana-kasus-pengerukan-alur-sungai-batanghari-ajukan-pk>), diakses pada 22 Juli 2024 (09.10 Wib)

<sup>10</sup> [https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada 22 Juli 2024 (10.45 Wib)

<sup>11</sup> [https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada 22 Juli 2024 (11.00 Wib)

<sup>12</sup> [https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada 22 Juli 2024 (11.00 Wib)

<sup>13</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e26d4130023d28f9aabde4ec3adbf42b.html>, diakses pada 22 Juli 2024 (10.20 Wib)

PT Cimendang Sakti Kontrakindo (CSK) memenangkan proyek lapangan merdeka multiyears 2023-2024 dengan nilai proyek fantastis, yaitu Rp 497,2 Miliar. Proyek ini merupakan proyek dengan nilai kontrak tertinggi yang pernah dimenangkan PT CSK. Revitalisasi Lapangan Merdeka bukan satu-satunya proyek yang dimenangkan PT CSK pada 2023. Pada tahun itu, perusahaan ini sedikitnya memenangkan 5 'proyek jumbo' senilai kontrak total Rp 940,8 miliar:

<b>Nama Proyek</b>	<b>K/L/OPD</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Nilai Kontrak</b>
Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka (Multi Years)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	500.261.000.000,00	497.207.615.427,14
Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako	Kementerian PUPR	184.080.049.000,00	172.262.586.189,00
Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara	Kementerian PUPR	97.137.400.000,00	80.623.809.600,00
Pembangunan dan Penataan Kawasan Strategi Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Halmahera Selatan	84.685.800.000,00	84.016.218.506,92
Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Kalimantan Barat 6	Kementerian PUPR	58.856.400.000,00	57.564.364.869,07
Pembangunan Pasar Rakyat Jailolo Kab. Halmahera Barat	Kementerian PUPR	52.902.200.000,00	49.199.072.900,00
<b>Total</b>		<b>977.922.849.000,00</b>	<b>940.873.667.492,13</b>

Pada 2022, PT CSK memenangkan 4 'tender jumbo' dengan nilai kontrak berkisar Rp 45-99,9 miliar. Jika ditarik mundur satu dekade terakhir, PT CSK pada 2014-2024 memenangkan 18 tender dengan total nilai kontrak Rp 1.357.279.228.579,-.<sup>14</sup>

Perolehan banyak tender PBJ dengan nilai kontrak fantastis membuat kapasitas dan kesanggupan PT CSK dipertanyakan. Ditelusuri dari akte perusahaan, perusahaan ini bertempat di Graha KBMP Lt. 2, Jl. RA. Kartini No. 42. ICW mencoba menelusuri keberadaan kantor PT CSK melalui *google*

<sup>14</sup> [https://opentender.net/tender?year=2023&page=1&page\\_size=25&q=cimendang+sakti+kontrakindo](https://opentender.net/tender?year=2023&page=1&page_size=25&q=cimendang+sakti+kontrakindo), diakses pada 26 Juli 2024.

maps. Pengambilan gambar google maps pada Januari 2024 menunjukkan bahwa kantor PT CSK di Graha KBMO dalam keadaan tidak terawal dan tertutup.<sup>15</sup>



Dalam lelang revitalisasi Lapangan Merdeka, PT CSK menyampaikan harga penawaran tinggi, yaitu 99,4% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ia juga mengalahkan perusahaan BUMN, seperti PT Utama Karya, PT Nindya Karya, dan PT Waskita Karya. Untuk mengerjakan proyek-proyek raksasa, penyedia membutuhkan kemampuan yang menjanjikan, baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pengalaman, maupun modal.

Selain revitalisasi Lapangan Merdeka, PT CSK juga menjadi penyedia proyek “Pembangunan dan Penataan Kawasan Strategi Ekonomi” di Dinas PUPR Halmahera Selatan. Terkait pengadaan ini, Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, melakukan pemanggilan kepada PT Cimendang Sakti Kontrakindo dan Dinas PUPR Halmahera Selatan.<sup>16</sup> Pemanggilan tersebut untuk mendapatkan penjelasan menangani perkembangan penyelesaian proyek yang disebut belum mencapai target. Ditelusuri di LPSE dan Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), proyek ini tertulis dimulai pada Juni 2023 hingga Desember 2024.

PT CSK juga menjadi pemenang tender proyek Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako. Proyek Kementerian PUPR ini bernilai kontrak Rp 172 Miliar dan ditargetkan selesai pada Juli 2024. Tender proyek ini sempat dinyatakan gagal dan kemudian diulang dengan alasan “tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran”. Pada tender pertama tanggal 5 Juni 2023 yang dinyatakan gagal<sup>17</sup>, PT CSK merupakan salah satu peserta tender. PT CSK saat itu mengajukan penawaran Rp 147 Miliar dari pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 184 Miliar. Penawaran itu tak sampai 80% dari HPS. PT CSK kemudian dinyatakan gagal dengan alasan:

*“Gugur evaluasi teknis karena Bukti kepemilikan/penguasaan alat tidak sama dengan alat-alat yang tercantum dalam daftar isian peralatan utama (diantaranya alat Concrete Pump)”*

<sup>15</sup> Google maps diakses pada 1 Agustus 2024 pukul 17:40 WIB

<sup>16</sup> DPRD Halmahera Selatan Jadwalkan Panggil PT Cimendang Sakti, Buntut Proyek Multiyears Bermasalah (Link: <https://ternate.tribunnews.com/2024/05/22/dprd-halmahera-selatan-jadwalkan-panggil-pt-cimendang-sakti-buntut-proyek-multiyears-bermasalah>), diakses pada 22 Juli 2024 (15.10 Wib)

<sup>17</sup> Tender pertama PBJ Rumah Sakit Tadulako (5 Juni 2023): <https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/85560064/hasil>

PT CSK mengikuti tender ulang proyek ini yang dibuka pada 23 Agustus 2023. PT CSK kembali mengajukan penawaran Rp 147 Miliar yang kemudian dikoreksi menjadi Rp 172 Miliar.<sup>18</sup>

Pengumuman		Peserta		Hasil Evaluasi		Pemenang		Pemenang Berkontrak				
No	Nama Peserta	K	B	A	T	P	PT	HN	H	P	PK	Alasan
1	PT. Cimendang Sakti Kontrakindo - 02.128.293.4-432.000	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 147.448.144.266,26	Rp. 172.262.586.189,63	✓	★	★	

PT CSK kemudian dinyatakan sebagai pemenang. Selain soal penawaran awal yang rendah, PT CSK dalam jangka waktu 2,5 bulan dapat memenuhi syarat “Bukti kepemilikan/penguasaan alat tidak sama dengan alat-alat yang tercantum dalam daftar isian peralatan utama (diantaranya alat Concrete Pump)” yang menjadi alasan kenapa perusahaan ini gagal di tender pertama.

## Keterbukaan Informasi Pengadaan Lapangan Merdeka

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara yang merupakan bagian dari jejaring ICW dalam advokasi keterbukaan informasi Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) pada 23 Mei 2023 mengajukan permohonan informasi terkait sejumlah dokumen atau informasi terkait anggaran dan pengadaan Lapangan Merdeka. Informasi yang dimohon yaitu:

1. Data Aset Kota Medan di Kawasan Lapangan Merdeka tahun 2021 dan 2022;
2. APBD dan Data Perencanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Medan TA 2022 dan 2023;
3. Data AMDAL Dan Andalalin Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka tahun 2022;
4. Kontrak antara Pemerintah Kota Medan dengan pemenang tender dalam proyek:

No	Nama Tender	Kode Tender	TA	Nilai Kontrak	Pemenang Tender
1.	Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka (Multi Years)	13714308	2023	Rp 500.261.073.000,-	PT Cimendang Sakti Kontrakindo
2	Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan	13324308	2022	Rp 97.500.000.000,-	PT Lince Romauli Raya
3	Jasa konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	13333308	2022	Pagu Rp 5.300.000.000,- HPS Rp 286.410.000,-	PT Artek Utama

<sup>18</sup> Tender kedua PBJ Rumah Sakit Tadulako (23 Agustus 2023): <https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/86177064/hasil>

Lapangan Merdeka Dhi Penyusunan Study Kelayakan Lapangan Merdeka Kota Medan				
--	--	--	--	--

5. Kerangka Acuan Kerja 3 proyek *a quo*;
6. Laporan penyelesaian pekerjaan 3 proyek *a quo*; dan
7. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 3 proyek *a quo*..

Informasi dimohon dengan pertimbangan:

1. ICW dan FITRA Sumatera Utara sebelumnya bermaksud mengkaji proyek revitalisasi Lapangan Merdeka. Kajian tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pengawalan publik, terlebih lagi revitalisasi Lapangan Merdeka diberitakan menelan anggaran yang cukup besar, yaitu mencapai lebih dari Rp 600 Miliar.
2. Revitalisasi Lapangan Merdeka mendapat perhatian besar dari koalisi masyarakat sipil di Kota Medan. Hal ini utamanya karena proyek ini dinilai merusak situs cagar budaya Lapangan Merdeka dengan **adanya penambahan fungsi pusat kegiatan perdagangan/ bisnis pada situs cagar budaya** Lapangan Merdeka sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Medan No. 1 tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2022-2042 pasal 8 (1). Keterbukaan informasi pengadaan dan kajian yang lebih berbasis data diharapkan dapat lebih memperjelas bagaimana rencana pembangunan Lapangan Merdeka oleh pemerintah kota Medan dan dapat lebih membuka ruang partisipasi publik dalam rangka melakukan pengawasan.
3. FITRA Sumatera Utara yang terlibat dalam koalisi bersama ICW bermaksud melakukan asesmen atas implementasi keterbukaan informasi PBJ yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Keterbukaan informasi PBJ juga merupakan bagian dari rencana aksi **Open Government Indonesia 2023-2024** dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI sebagai *focal point*. Dalam rencana aksi keterbukaan informasi PBJ tersebut, ICW merupakan pemangku kepentingan dari pihak organisasi masyarakat sipil.

Sayangnya, permohonan informasi ini diabaikan oleh Pemerintah Kota Medan. Upaya mendapat informasi bergulir hingga memasuki sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara. Setelah menempuh proses panjang, Komisi Informasi Sumatera Utara pada 13 November 2023 menyatakan mengabulkan permohonan informasi FITRA Sumut dengan catatan data pribadi dalam dokumen yang dimohon dihitamkan dan memerintahkan Pemerintah Kota Medan untuk menyerahkan informasi tersebut kepada FITRA Sumut. Namun hingga kini, Agustus 2024, putusan tersebut diingkari oleh Pemerintah Kota Medan.



## Penutup

Melalui laman instagram pribadinya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan bahwa progres revitalisasi Lapangan Merdeka Medan telah mencapai 55,13% per 10 Agustus 2024. Rangkaian proyek revitalisasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024.

Menelan anggaran fantastis dan disertai dengan kritik warga atas urgensi merawat Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, mega proyek Lapangan Merdeka sangat penting publik awasi. Terlebih, sebelumnya terdapat pengadaan di Kota Medan yang juga bermasalah hingga berbau korupsi, seperti pengadaan lampu pocong yang bahkan disebut sebagai “proyek gagal”.

Pemerintah Kota Medan juga perlu mengoreksi diri dengan bersikap terbuka dalam pengadaan Lapangan Merdeka ataupun pengadaan lain yang diselenggarakan. PerKI No. 1 Tahun 2021 bahkan menyebut bahwa informasi pengadaan, termasuk yang dimohon oleh FITRA Sumatera Utara, merupakan informasi yang seharusnya disediakan secara berkala. Sehingga, tanpa publik bersusah payah menempuh proses sengketa di Komisi Informasi Sumatera Utara, Pemkot Medan sudah sepatutnya membuka informasi tersebut kepada publik sebagai wujud pengadaan yang transparan serta akuntabel.